

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adji, Indriyanto Seno. 2006. Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana. Jakarta: Diadit Media
- Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, Mahrus. 2011. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press
- Ali, Zainudin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Anggara, Sahya. 2018. Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia
- Arief, Barda Nawawi. 2012. Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia). Semarang: Perpustakaan UNDIP Semarang
- Arief, Barda Nawawi. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru edisi kedua. Jakarta: Kencana
- Atmosudirjo, Prajudi. 1966. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Graha Indonesia
- Alpeldoorn, L.J. Van. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadya Paramita
- Budiardjo, Miriam. 1986. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan
- Carrol, Axel. 2007. Constitutional and Administrative Law, Fourth Edition. Edinburg: Pearson Education
- D, Moh. Mahfud M. 2000. Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta
- D, Moh. Mahfud M. 2012. Membangun Negara Hukum, Menegakan Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Efendi, A'aan dkk. 2019. Hukum Administrasi. Jakarta: Sinar Grafika
- Hadjon, Philipus M. 1997. Tentang Wewenang. Surabaya: Yuridika
- Hadjon, Philipus M. 2019. Pengantar Hukum Admnistrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hartati, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika

- Hujibers, Theo. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta: Kanisius
- Ibrahim, Johony. 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing
- Indroharto. 2005. Usaha Memahami Undang-undang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kansil, C.S.T dkk. 2001. Ilmu Negara: Umum dan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita
- Klitgaard, Robert. 2001. Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Klitgaard, Roberd dkk. 2005. Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah, Alih Bahda Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kusnardi dkk. 1985. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti
- Latif, Abdul. 2014. Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenada Media Group
- Lafree, Garry dkk. 2004. Corruption as a Global Social Problem, dalam George Ritzer, Hanbook of social Problem: A Comprative International Prespective. California: Sage Publication
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2014. Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Thafa Medai
- Margono, H. 2009. Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. 1992. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta
- Minarno, Nur Basuki. 2009. Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Palangkaraya: Laksbang Mediatama
- Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia
- R, Ridman H. 2001. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Rohim. 2008. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi. Depok: Pena Multi Media
- Saputra, Dwi dkk. 2004. Tiada Ruang Tanpa korupsi. Semarang: KP2KKN Jawa Tengah
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju
- Seerden, Rena dkk. 2002. Administrative Law in The Netherlans. Antwerpen Gronigen: Intersentia Uitgevers
- Shah, Anwar. 2007. Public Sector Governance and Accountability Series Performance Accountability and Combating Corruption. Washington DC: The World Bank
- Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. Bandung : PT. Refika Aditrama
- Singgih. 2002. Dunia Memerangi Korupsi. Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan
- Soedarto. 2009. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam
- Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pemidaan. Jakarta: Sinar Grafika
- Wiryono, R. 2009. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Sinar grafika
- Yasyi, Sulchan. 1997. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amanah
- Yunus, Benny M. 1980. Intisari Hukum Administrasi Negara. Bandung: Alumni

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018, Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen ketiga)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

#### **MAKALAH & JURNAL:**

Fahmiron (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*

Manan, B (2000). *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah Seminar Nasional*. Fakultas Hukum Unpad Bandung

Mangunsong, Parlin M (2001). *Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara. Jurnal UII*. Yogyakarta

Marlina, R (2018). *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Jurnal Daulat Hukum*. Volume 1

Mudhoffir, A M (2013), *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. Jurnal Sosiologi*. Volume 18

Mukhlis. *Bahan Ajar Mata Kuliah Pidana Korupsi*. FH UNRI

**WEB:**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lr5514fdcf7f91b/uu-administrasi-pemerintahan-trigger-berantas-korupsi>

<http://news.detik.com/berita/2873765/uu-administrasi-pemerintahan-dinilai-mengudeta-pemberantasan-korupsi>

[www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-pengujian](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-pengujian)

